

Kemiskinan di Indonesia: Analisis Ekonometrika terhadap Faktor-Faktor Makroekonomi Tahun 2007–2016

Poverty in Indonesia: Econometric Analysis of Macroeconomic Factors 2007–2016

Ainur Rofiq
ainur367@gmail.com

Article history	Submitted: 2025/06/20; Revised: 2025/07/05; Accepted: 2025/07/09
Abstract	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam periode 2007–2016. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara parsial, variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh signifikan, sedangkan belanja pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,981 menunjukkan bahwa 98,1% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut.
Keywords	Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, Kemiskinan.
	© 2025 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ .

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang krusial di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan berat dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang berakar pada berbagai faktor struktural dan non-struktural. Kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga menunjukkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi yang setara. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang harus ditangani secara sistemik dan berkelanjutan (Arsyad & Pembangunan, 2010).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari 16,58% pada tahun 2007 menjadi 10,86% pada tahun 2016 (Statistik, 2017). Meski tren penurunan terlihat signifikan secara statistik, secara substansi masih terdapat jutaan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan berjalan lambat dan cenderung stagnan pada beberapa tahun, mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi makro belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.

Pertumbuhan ekonomi sering kali dianggap sebagai instrumen utama dalam menurunkan kemiskinan. Secara teoritis, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara diharapkan menciptakan efek “trickle down” yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Wilson, 2021). Namun, dalam kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta menghapus kemiskinan jika tidak dibarengi dengan pemerataan dan keadilan distribusi pendapatan (Amalia et al., 2022).

Pengangguran menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kemiskinan di Indonesia. Ketika masyarakat tidak memiliki pekerjaan yang layak, maka pendapatan pun tidak tersedia, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi—yakni 9,11% pada tahun 2007 dan masih berada pada angka 5,5% pada 2016—menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal (Statistik, 2017).

Selain pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, belanja pemerintah juga memainkan peran penting dalam menekan angka kemiskinan. Dalam teori ekonomi publik, belanja pemerintah adalah alat kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi kegagalan pasar dan memperbaiki distribusi pendapatan (Suparmoko, 2002). Melalui alokasi anggaran negara, pemerintah dapat menyediakan layanan

publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial yang dibutuhkan kelompok masyarakat miskin.

Namun demikian, efektivitas belanja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan masih menjadi perdebatan. Banyak studi menemukan bahwa peningkatan belanja negara tidak selalu sejalan dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran (Setiawan & Fikriah, 2020). Dengan kata lain, tingginya belanja pemerintah tidak menjamin adanya peningkatan kesejahteraan jika alokasi dan implementasinya tidak tepat sasaran.

Dari perspektif Islam, kemiskinan adalah kondisi yang harus diperangi karena dapat menjadi penyebab melemahnya iman dan moral masyarakat. Dalam QS. Al-Ma'un ayat 1–3, orang yang mendustakan agama adalah mereka yang tidak peduli terhadap anak yatim dan orang miskin. Dalam konteks pemerintahan Islam, seorang pemimpin berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Oleh karena itu, peran negara dalam mengurangi kemiskinan bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan juga tanggung jawab moral dan keagamaan.

Beberapa program pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan subsidi pangan (Raskin) telah dijalankan untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Namun, pelaksanaan program-program ini sering kali menghadapi kendala seperti pendataan yang tidak akurat, tumpang tindih program, serta rendahnya kapasitas kelembagaan daerah (Najwa et al., 2024). Dengan demikian, dibutuhkan sinergi antara kebijakan makro dan mikro dalam menangani kemiskinan secara lebih efektif.

Melihat kondisi di atas, penting untuk memahami bagaimana ketiga variabel utama—pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan belanja pemerintah—berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kajian empiris terhadap relasi antara variabel-variabel tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas bagi perumusan kebijakan ekonomi nasional ke depan. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menganalisis data kuantitatif dari tahun 2007 hingga 2016.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami dinamika kemiskinan di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat diskursus mengenai faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan program-program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif-kuantitatif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan belanja pemerintah terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2007–2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan dokumen lain yang relevan. Data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis tren makroekonomi nasional yang tercermin dalam angka-angka statistik public (Kuantitatif, 2016). Data yang dikumpulkan mencakup: Data tingkat kemiskinan (dalam persentase), Data pertumbuhan ekonomi (dalam persen PDB tahunan), Data tingkat pengangguran terbuka (dalam persen), Data belanja pemerintah pusat (dalam miliar rupiah). Data dikumpulkan secara tahunan selama periode 2007–2016.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan merekam data dari sumber-sumber resmi dan publikasi statistik nasional. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data numerik yang dibutuhkan untuk analisis regresi (Nazir, 2005). Untuk menghindari ambiguitas, berikut definisi operasional setiap variabel dalam penelitian: Tingkat Kemiskinan (Y): Persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sesuai dengan indikator BPS yang menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Pertumbuhan Ekonomi (X_1): Persentase perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan. Pengangguran (X_2): Tingkat pengangguran terbuka, yaitu persentase jumlah angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Belanja Pemerintah (X_3): Jumlah total pengeluaran pemerintah pusat (dalam APBN) yang mencakup belanja barang dan modal, diukur dalam miliar rupiah.

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Model regresi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Secara matematis model yang digunakan dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y: Tingkat kemiskinan
- α : Konstanta (intersep)
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

- X_1 : Pertumbuhan ekonomi
- X_2 : Pengangguran
- X_3 : Belanja pemerintah
- ε : Error term

3. HASIL dan PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

Penelitian ini menganalisis empat variabel utama dalam rentang waktu 2007–2016, yakni tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan belanja pemerintah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa:

- a. Tingkat kemiskinan mengalami tren penurunan, dari 16,58% pada tahun 2007 menjadi 10,86% pada tahun 2016 (Statistik, 2017).
- b. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan fluktuasi, berkisar antara 4,63% (2009) hingga 6,49% (2011), dengan kecenderungan menurun pada tahun-tahun terakhir (Statistik, 2017).
- c. Tingkat pengangguran cenderung menurun dari 9,11% menjadi 5,50% selama periode pengamatan (Statistik, 2017).
- d. Belanja pemerintah terus meningkat secara nominal dari Rp504 triliun (2007) menjadi Rp1.449 triliun (2016) (Statistik, 2017).

Deskripsi statistik menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan makroekonomi pemerintah mengalami dinamika, tetapi belum sepenuhnya linier terhadap penurunan kemiskinan. Sebelum melakukan regresi linier berganda, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model. Hasilnya adalah:

- a. Uji Normalitas: Distribusi residual menunjukkan pola menyebar secara simetris, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.
- b. Uji Multikolinearitas: Nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 untuk semua variabel, menandakan tidak terjadi multikolinearitas.
- c. Uji Autokorelasi: Nilai Durbin-Watson sebesar 1,72, mendekati angka 2, menunjukkan tidak adanya autokorelasi.

- d. Uji Heteroskedastisitas: Scatterplot menunjukkan sebaran titik acak tanpa pola tertentu, yang mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas (Gujarati, 2004).

3.2. Hasil Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 45,82 - 1,25X_1 + 0,98X_2 - 0,002X_3 + \varepsilon$$

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi (X_1): Koefisien regresi -1,25; nilai signifikansi $0,004 < 0,05 \rightarrow$ signifikan. Artinya, setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,25%, ceteris paribus.
- b. Pengangguran (X_2): Koefisien regresi 0,98; nilai signifikansi $0,001 < 0,05 \rightarrow$ signifikan. Ini berarti peningkatan 1% pengangguran meningkatkan kemiskinan sebesar 0,98%.
- c. Belanja Pemerintah (X_3): Koefisien regresi -0,002; nilai signifikansi $0,133 > 0,05 \rightarrow$ tidak signifikan secara statistik. Meskipun koefisien negatif, kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan tidak signifikan secara ekonometrik.

Nilai R-squared sebesar 0,981 menunjukkan bahwa 98,1% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan belanja pemerintah). Sisanya, yaitu 1,9%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model seperti inflasi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan faktor sosial-politik (Gujarati, 2004).

3.3. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini konsisten dengan teori ekonomi pembangunan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan peningkatan pendapatan nasional, yang pada akhirnya mampu memperluas kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat miskin (Wilson, 2021). Namun, perlu ditekankan bahwa efeknya tergantung pada distribusi hasil pertumbuhan, apakah dinikmati oleh kelompok bawah atau hanya elite ekonomi.

Pengangguran terbukti memiliki dampak positif signifikan terhadap kemiskinan. Tingginya pengangguran menyebabkan rendahnya daya beli dan ketidakstabilan sosial. Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa kunci utama dalam menurunkan kemiskinan adalah penciptaan lapangan kerja produktif, terutama bagi masyarakat usia kerja yang tidak memiliki keterampilan memadai (Arsyad &

Pembangunan, 2010).

Sementara itu, belanja pemerintah yang meningkat secara nominal ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas alokasi anggaran publik. Beberapa studi terdahulu mengemukakan bahwa masalah utama dalam belanja pemerintah adalah rendahnya efisiensi dan tingginya kebocoran anggaran. Program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, birokrasi yang rumit, dan minimnya transparansi menjadi faktor penghambat keberhasilan belanja fiskal (Salsabila et al., 2024).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menyiratkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Indonesia bukan hanya soal menambah anggaran, tetapi juga soal kualitas belanja, tata kelola, dan keberpihakan terhadap rakyat miskin.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2007–2016, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Temuan ini konsisten dengan teori ekonomi pembangunan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin tinggi pula angka kemiskinan. Ini menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu strategi krusial dalam mengurangi kemiskinan.

Belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Meskipun secara teori belanja negara seharusnya dapat menjadi alat redistribusi kesejahteraan melalui penyediaan layanan publik dan program sosial, temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, peningkatan belanja pemerintah belum efektif dalam menekan angka kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidaktepatan sasaran, rendahnya efisiensi anggaran, dan lemahnya tata kelola fiskal.

Model regresi menjelaskan 98,1% variasi tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa ketiga variabel—pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan belanja pemerintah—secara bersama-sama memiliki kontribusi yang sangat tinggi dalam

menjelaskan dinamika kemiskinan di Indonesia selama periode yang diteliti.

Daftar Pustaka

- Amalia, F., Sinaga, R., Soeyatno, R. F., Silitonga, D., Solikin, A., Hubbansyah, A. K., Siregar, R. T., Maulina, D., Kusumaningrum, R., & Sahamony, N. F. (2022). *Ekonomi pembangunan*. Penerbit Widina.
- Arsyad, L., & Pembangunan, E. (2010). *UPP STIM YKPM*. Yogyakarta.
- Gujarati, N. D. (2004). *Basic Econometrics*. New York: McGraw. Inc.,.
- Kuantitatif, P. P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Najwa, Y., Amanda, P. D., Fatmawati, F., Al-Kalam, S., & Wahyudi, S. N. (2024). Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan di Indonesia. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 1–20.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian Cetakan Keenam*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13.
- Setiawan, A., & Fikriah, F. (2020). Pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 5(4), 212–221.
- Statistik, B. P. (2017). *Badan pusat statistik*. Badan Pusat Statistik.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Andi.
- Wilson, R. (2021). *Economic development in the Middle East*. Routledge.